

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ajzen, I., 2012. The Theory of Planned Behavior. In P. A. M. Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), *Handbook of theories of social psychology* (Vol. 1, pp. 438–459). London, United Kingdom: SAGE.
- Andi Hamzah, 1991, Korupsi Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2013, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ermansyah Djaja, 2013, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- J.M. Van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana I, Bina Cipta, Bandung.
- Jan Rimmelink, 2003, Hukum Pidana, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Juhaya S. Praja, 2011, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexi J. Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Ali Zaidin, 2016, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mohammad Noor Syam, 2007, Sistem Sanksi Dlam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Mr. J.M. Van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana I, Bina Cipta, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung.
- Rosady Ruslan, 2004, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Raja Grafindo, Jakarta.
- R. Soesilo, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Karya Nusantara, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1979, Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum, Alumni, Bandung.
- Surachmin Suhandi Cahaya, 2011, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syed Husien Alatas, 1983, Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta.
- Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1996, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, K.P.H.A, 2020, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club (ILC), Surabaya.
- Tri Andrisman, 2009, Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Victor M. Situmorang, 1994, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Zainal Abidin Farid, 2005, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Artikel Jurnal:**

- Ajzen, I., 1985, The Theory of Planned Behaviour, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. **50** (2): 179–211.
- Ajzen, 2020, The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions, *Human Behavior and Emerging Technology*, 2, 314-324
- Bosnjak M., 2020. The Theory of Planned Behavior: Selected Recent Advances and Applications
- Carissa Byrne Hessick, 2008, “Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?”, *Boston University Law Review*, 88 (1109)
- Cheng, EWL., 2006, Choosing between the theory of planned behavior (TPB) and the technology acceptance model (TAM)

- La Barbera, F., & Ajzen, I. (2020a). Control interactions in the theory of planned behavior: Rethinking the role of subjective norm. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 401-417.
- M. Syamsa Ardisasmita, DEA, 2006, "Definisi Korupsi Menurut Perpektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel", Artikel, diakses melalui <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf> ,pada tanggal 25 Mei 2020
- Rizanizarli, "Teori-teori Pidana dan Perkembangannya", Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XIV, No. 38, Tahun 2008.

#### **Artikel Majalah atau Koran:**

- Agie Permadi, "Terima Suap, Eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husein Divonis 8 Tahun Penjara", Kompas, 8 April 2019, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/04/08/16280421/terima-suap-eks-kalapas-sukamiskin-wahid-husein-divonis-8-tahun-penjara>.
- Eri Komar Sinaga, "Ini 10 Penyebab Koruptor Tidak Jera Versi ICW", Tribun News, 18 Februari 2016, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/02/18/ini-10-penyebab-koruptor-tidak-jera-versi-icw>.
- Huyogo Siombolon, "Fahmi Darmawansyah Akui Berikan Mobil dan Uang untuk Kalapas Sukamiskin", Liputan 6, 13 Desember 2018, diakses melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/3806980/fahmi-darmawansyah-akui-berikan-mobil-dan-uang-untuk-kalapas-sukamiskin>.
- Malvyandie Haryadi, "Inilah Tiga Residivis Korupsi Mulai Bupati Hingga Ketua DPRD", Tribun News, 6 Januari 2018, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/06/inilah-tiga-residivis-korupsi-mulai-bupati-hingga-ketua-dprd>.
- Ray Jordan, "Gayus Lagi ke Singapura Nonton Tennis di Bali dan Makan di Restoran", Detik News, 22 September 2015, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3025060/gayus-lagi-ke-singapura-nonton-tenis-di-bali-dan-makan-di-restoran>.

#### **Internet:**

- Alfitra, "Pemiskinan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", <https://media.neliti.com/media/publications/155071-ID-pemiskinan-terhadap-pelaku-tindak-pidana.pdf> diakses 29 Nopember 2020.
- Dr. M. Syamsa Ardisasmita, DEA, "Definisi Korupsi Menurut Perpektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel",

<https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>, diakses 25 Mei 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan”, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses 5 Januari 2021.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

#### **Putusan Pengadilan:**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/PID.SUS/2014, perihal Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi, 4 Juni 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261K/PID.SUS/2015 perihal Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Anas Urbaningrum, 8 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787K/PID.SUS/2016 perihal Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Ir. Jero Wacik, SE, 26 Oktober 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
01/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG, perihal Perkara Tindak Pidana  
Korupsi Drs. Arief Zainuddin, MM, 7 Maret 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor  
20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, perihal Perkara Tindak Pidana  
Korupsi Drs. Djoko Susilo, SH, M.Si., 27 Agustus 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/PID.SUS.TPK/2015/PN.SBY,  
perihal Perkara Tindak Pidana Korupsi Sujoko bin Sarimin, 10 Maret 2015.

**Kamus:**

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

